



Hegemoni Kekuasaan Adat Dalam Akses Kepemimpinan Desa di Kedepatian Semerap

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Alif Ferianda Universitas Jambi alifferianda1@gmail.com Muliono Univeritas Jambi Zakly Hanafi Ahmad Universitas Jambi	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Ferianda, A., Muliono, & Ahmad, Z. H. (2026). Hegemoni Kekuasaan Adat Dalam Akses Kepemimpinan Desa di Kedepatian Semerap. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2417-2422.

Abstrak

Kekuasaan adat masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di Kedepatian Semerap, termasuk dalam menentukan kepemimpinan desa. Peran tersebut terlihat dari keterlibatan tokoh adat dalam proses pencalonan kepala desa serta adanya ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam struktur adat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kekuasaan adat memengaruhi kesempatan masyarakat untuk mengakses kepemimpinan desa di Kedepatian Semerap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur adat memiliki posisi penting dalam menentukan akses terhadap pencalonan kepala desa. Pengaruh tersebut tidak hanya berjalan melalui aturan adat, tetapi juga melalui penerimaan masyarakat terhadap kedudukan tokoh adat dan aturan yang berlaku. Penerimaan tersebut dapat dipahami melalui konsep consent dan common sense dalam pemikiran Gramsci. Pada saat yang sama, muncul kritik dari sebagian masyarakat dan upaya warga di luar struktur adat untuk mengikuti pencalonan kepala desa. Meskipun kritik tersebut belum mengubah pola pencalonan yang berlaku, keberadaannya menunjukkan bahwa pembatasan akses terhadap kepemimpinan desa mulai dipertanyakan oleh sebagian masyarakat. Kekuasaan adat tetap memiliki pengaruh kuat dalam menentukan akses terhadap kepemimpinan desa karena didukung oleh aturan adat dan penerimaan masyarakat terhadap kedudukan tokoh adat.

Kata Kunci: Kekuasaan Adat, Hegemoni, Antonio Gramsci, Kepemimpinan Desa, Kedepatian Semerap

Abstract

Customary power still has an important role in the life of the people in Semerap District, including in determining village leadership. This role can be seen from the involvement of traditional leaders in the process of nominating village heads and the existence of provisions related to a person's position in the customary structure. This study aims to see how customary power affects people's opportunities to access village leadership in Kedepatian Semerap. This research uses a qualitative approach with a descriptive design. Data was obtained through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed qualitatively using Antonio Gramsci's hegemony theory. The results of the study show that customary structures have an important position in determining access to the nomination of village heads. This influence does not only run through customary rules, but also through public acceptance of the position of traditional leaders and applicable rules. This acceptance can be understood through the concepts of consent and common sense in Gramsci's thought. At the same time, there was criticism from some communities and efforts by residents outside the customary structure to follow the candidacy of the village head. Although these criticisms have not changed the prevailing candidacy pattern, their existence shows that restrictions on access to village leadership are beginning to be questioned by some communities. Customary power still has a strong influence in determining access to village leadership because it is supported by customary rules and community acceptance of the position of traditional leaders.

Key Words: Customary Power, Hegemony, Antonio Gramsci, Village Leadership, Kedepatian Semerap

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya dipengaruhi oleh struktur pemerintahan formal yang dibentuk negara, tetapi juga oleh institusi lokal yang memiliki legitimasi dan pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah Lembaga Adat. Di berbagai daerah, keberadaan lembaga adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya melalui keterlibatannya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta arah pembangunan desa (M.Yusuf & Effendi, 2021). Hubungan antara pemerintahan formal dan kepemimpinan adat menunjukkan bahwa kekuasaan di tingkat lokal tidak hanya bersumber dari kewenangan yang diatur secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh aktor-aktor informal yang memiliki pengaruh dan bahkan mendominasi praktik penyelenggaraan pemerintahan (Mayrudin et al., 2020).

Kuatnya peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga terlihat di Kedepatian Semerap, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di wilayah ini, lembaga adat tidak hanya berperan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, tetapi juga berpengaruh penting dalam proses pencalonan kepala desa. Sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan, penetapan calon terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah Nenek Mamak, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah Kaum Empat Jenis untuk menentukan calon yang dapat mengikuti pemilihan kepala desa. Melalui mekanisme tersebut, calon kepala desa yang dapat mengikuti kontestasi merupakan individu yang menjabat sebagai Depati atau Nenek Mamak di dalam struktur kepemimpinan adat (Efyanti et al., 2017). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengaruh lembaga adat di Kedepatian Semerap telah melampaui fungsi sosial budaya dan menjangkau proses pembentukan kepemimpinan politik di tingkat desa.

Fenomena keterlibatan lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah menjadi perhatian berbagai penelitian dengan fokus kajian yang berbeda. Penelitian mengenai Kedepatian Semerap lebih banyak mengkaji peran lembaga adat dalam menentukan calon kepala desa melalui mekanisme musyawarah adat sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa (Efyanti et al., 2017). Penelitian lain menjelaskan bahwa pengaruh lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tercermin dari dominasi lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan desa (M. Yusuf & Effendi, 2021). Pada lingkup yang lebih luas, hubungan antara kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal dipahami sebagai relasi kekuasaan yang memungkinkan aktor informal memengaruhi bahkan mendominasi praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal (Mayrudin et al., 2020).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan kuatnya pengaruh lembaga adat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, fokus kajiannya

masih terbatas pada peran lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan, mekanisme pencalonan kepala desa, serta relasi antara kepemimpinan formal dan informal. Fokus tersebut belum mampu menjelaskan bagaimana dominasi lembaga adat dipertahankan sebelum proses pencalonan kepala desa berlangsung. Padahal, sebelum proses pencalonan kepala desa berlangsung, terdapat mekanisme yang lebih mendasar yaitu pembatasan akses terhadap struktur kepemimpinan adat yang menentukan siapa yang memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari struktur tersebut sebagai prasyarat mengikuti kontestasi kepala desa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembatasan akses politik dalam struktur kepemimpinan adat menjadi mekanisme yang mereproduksi dominasi adat dalam kepemimpinan desa di Kedepatian Semerap. Untuk menjelaskan mekanisme tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif hegemoni Antonio Gramsci yang memandang dominasi tidak hanya dipertahankan melalui kekuasaan yang bersifat koersif, tetapi juga melalui persetujuan sosial (*consent*) yang membentuk penerimaan masyarakat terhadap nilai, aturan, dan praktik yang dipahami sebagai suatu kewajiban (*common sense*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai politik lokal dengan menunjukkan bahwa dominasi adat tidak hanya dipertahankan melalui mekanisme pencalonan kepala desa, tetapi juga direproduksi melalui pembatasan akses politik dalam struktur kepemimpinan adat.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami praktik kekuasaan adat dan pengaruhnya terhadap akses kepemimpinan desa di Kedepatian Semerap. Penelitian dilaksanakan di lima desa dalam wilayah Kedepatian Semerap, yaitu Desa Semerap, Desa Koto Baru, Desa Koto Tengah, Desa Pasar Semerap, dan Desa Koto Patah. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam persoalan adat dan kepemimpinan desa. Pemilihan informan dapat berkembang melalui snowball sampling hingga informasi yang diperoleh mencapai kejenuhan (Anto et al., 2024; Samsu, 2017).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai praktik kekuasaan adat, kepemimpinan desa, penerimaan masyarakat, serta respons terhadap pembatasan akses politik (Hadi et al., 2021).

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang diperoleh dipilah dan difokuskan pada temuan yang berkaitan dengan kekuasaan adat dan akses terhadap kepemimpinan desa, kemudian disajikan secara naratif dan dianalisis menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci, khususnya konsep *consent*, *common sense*, dominasi, dan resistensi (Anto et al., 2024). Keabsahan data diperiksa melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan observasi, dan triangulasi, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Syamsuddin et al., 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

Struktur Kepemimpinan Adat sebagai Prasyarat Akses Politik

Akses terhadap kepemimpinan desa di Kedepatian Semerap terlebih dahulu ditentukan oleh kedudukan seseorang dalam struktur kepemimpinan adat. Individu yang dapat diusulkan sebagai calon kepala desa merupakan mereka yang sedang menjabat sebagai Depati atau Nenek Mamak aktif dalam struktur adat Kedepatian Semerap. Proses pencalonan diawali dengan musyawarah Nenek Mamak untuk menjaring bakal calon dari kelompok Depati atau Nenek Mamak, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah Kaum Empat Jenis untuk menetapkan calon yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa (Efyanti et al., 2017). Kedudukan dalam struktur kepemimpinan adat menjadi prasyarat awal bagi seseorang untuk memperoleh akses terhadap kontestasi kepemimpinan desa di Kedepatian Semerap.

Untuk menduduki posisi dalam struktur kepemimpinan adat, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan adat. Persyaratan tersebut mencakup kualitas pribadi seperti wibawa, pendidikan, dan kemampuan kepemimpinan, serta keterikatan genealogis dan kepemilikan *ske* dari pihak istri. Kepemilikan *ske* oleh istri menjadi

salah satu kriteria penting untuk menduduki posisi Nenek Mamak, sementara suami yang menyandang kedudukan tersebut juga harus berasal dari Kedepatian Semerap. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan dalam struktur kepemimpinan adat tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh hubungan genealogis dan kekerabatan yang diakui dalam adat Kedepatian Semerap.

Keterbatasan akses terhadap posisi dalam struktur adat turut memengaruhi peluang masyarakat untuk mengikuti kontestasi kepala desa. Seseorang yang tidak berasal dari kalangan tokoh adat tidak dapat secara langsung memasuki pencalonan kepala desa, karena keterlibatan dalam kepemimpinan desa terlebih dahulu mensyaratkan adanya kedudukan dalam struktur adat. Situasi tersebut terlihat dari kasus seorang warga yang berupaya mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa, tetapi berkas pencalonannya ditolak karena tidak berasal dari kalangan tokoh adat. Upaya untuk memperoleh posisi dalam struktur adat pun tidak dapat dilakukan karena istrinya tidak memiliki garis keturunan Nenek Mamak atau *ske*, yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh kedudukan dalam struktur adat. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap struktur kepemimpinan adat menjadi salah satu faktor yang menentukan terbuka atau terbatasnya peluang seseorang untuk memasuki persaingan dalam pemilihan kepala desa.

Penerimaan Sosial terhadap Pembatasan Akses Politik

Pembatasan akses politik dalam kepemimpinan desa berlangsung di tengah kuatnya kedudukan tokoh adat dalam kehidupan masyarakat Kedepatian Semerap. Depati dan Nenek Mamak tidak hanya menjalankan fungsi dalam urusan adat, tetapi juga memiliki posisi sebagai figur yang dihormati dan menjadi rujukan dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan tersebut turut memengaruhi cara masyarakat memandang kepemimpinan desa, terutama ketika kepala desa juga berasal dari kalangan tokoh adat. Keterlibatan adat dalam menentukan kepemimpinan desa tidak sepenuhnya dipandang sebagai persoalan politik, melainkan berkaitan dengan tatanan kepemimpinan yang telah lama dikenal dan dijalankan dalam masyarakat.

Penerimaan terhadap kedudukan tokoh adat dalam kepemimpinan desa tidak berarti pembatasan tersebut diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan keterbatasan ruang politik yang hanya memberikan kesempatan kepada tokoh adat untuk memasuki kontestasi kepala desa. Pandangan ini muncul dari anggapan bahwa kepemimpinan desa seharusnya memberikan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan dan gagasan untuk membawa perubahan dalam pemerintahan desa. Kritik dan ketidakpuasan tersebut pada umumnya tidak berkembang menjadi penolakan terbuka terhadap tatanan adat yang berlaku. Penghormatan terhadap lembaga adat tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat, sementara tuntutan untuk membuka ruang politik yang lebih luas muncul secara terbatas melalui pandangan kritis dan ketidakpuasan terhadap praktik kepemimpinan yang berlangsung.

Keberlangsungan tatanan tersebut tidak terlepas dari kuatnya kedudukan adat dalam kehidupan masyarakat Kedepatian Semerap. Ketentuan mengenai kedudukan tokoh adat dan keterlibatannya dalam kepemimpinan desa telah berlangsung dalam waktu yang panjang sehingga dipahami sebagai bagian dari tata kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, keberadaan Depati dan Nenek Mamak tidak hanya berkaitan dengan struktur adat, tetapi juga melekat pada kehidupan sosial masyarakat Kedepatian Semerap. Kedudukan tersebut membuat keterlibatan adat dalam menentukan kepemimpinan desa memperoleh pengakuan dalam kehidupan masyarakat, sehingga pembatasan akses politik yang berlaku tetap dapat dipertahankan meskipun terdapat sebagian masyarakat yang mempertanyakan keterbukaan ruang pencalonan kepala desa.

Keterlibatan adat dalam menentukan kepemimpinan desa dapat dibaca melalui konsep hegemoni Antonio Gramsci, yang memandang bahwa kekuasaan suatu kelompok tidak hanya dipertahankan melalui paksaan, tetapi juga melalui kemampuan membangun persetujuan dari kelompok yang dipimpin (Patria & Arief, 2025).

Kedudukan Depati dan Nenek Mamak sebagai pemimpin adat di Kedepatian Semerap telah memperoleh pengakuan dalam kehidupan masyarakat, sehingga keterlibatan mereka dalam menentukan kepemimpinan desa dapat terus berlangsung di tengah adanya pandangan kritis dari sebagian masyarakat. Ketentuan yang menempatkan kedudukan adat sebagai prasyarat untuk memperoleh akses terhadap kepemimpinan desa tidak hanya membatasi kesempatan individu untuk mengikuti kontestasi, tetapi juga mempertahankan pola kepemimpinan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat. Pola kepemimpinan yang terus berlangsung tersebut

menunjukkan bahwa dominasi adat bekerja tidak hanya melalui pembatasan akses politik, tetapi juga melalui penerimaan terhadap aturan adat yang menjadi dasar pengaturan kepemimpinan desa.

Penerimaan terhadap aturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan struktur adat, tetapi juga dengan cara aturan tersebut dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan yang membatasi akses terhadap kepemimpinan desa dapat diterima sebagai bagian dari tata kepemimpinan yang dianggap wajar karena kedudukan Depati dan Nenek Mamak telah melekat dalam kehidupan sosial masyarakat Kedepatian Semerap.

Dalam proses hegemoni, suatu pandangan dapat menjadi dominan ketika disebarkan dan diterima sebagai nalar awam serta dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan benar dalam kehidupan masyarakat (Bakri, 2022).

Pengakuan terhadap kedudukan tokoh adat serta penerimaan terhadap aturan adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat turut mempertahankan pola kepemimpinan yang berpusat pada struktur adat. Pembatasan akses terhadap kepemimpinan desa tidak hanya berlangsung melalui ketentuan yang mengatur pihak-pihak yang dapat mengikuti kontestasi, tetapi juga melalui penerimaan masyarakat terhadap tatanan kepemimpinan yang menempatkan tokoh adat pada posisi penting dalam menentukan arah kepemimpinan desa. Dominasi adat tetap bertahan, meskipun sebagian masyarakat mulai mempertanyakan keterbukaan kesempatan dalam pencalonan kepala desa.

Munculnya Resistensi terhadap Pembatasan Akses Politik

Pembatasan akses terhadap kepemimpinan desa tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Di luar struktur kepemimpinan adat, muncul keinginan untuk memasuki kontestasi kepala desa, disertai pandangan sebagian masyarakat yang mempertanyakan terbatasnya kesempatan bagi mereka yang bukan tokoh adat untuk mencalonkan diri. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa aturan yang membatasi akses terhadap kepemimpinan desa tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat, meskipun struktur adat tetap memiliki posisi yang kuat dalam menentukan calon kepala desa.

Bentuk keberatan tersebut terlihat dari upaya seorang warga yang tidak berasal dari kalangan tokoh adat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Warga tersebut berusaha mengikuti proses pencalonan, tetapi pengajuannya tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi ketentuan yang mensyaratkan calon kepala desa berasal dari struktur kepemimpinan adat. Keinginan untuk memperoleh kedudukan dalam struktur adat juga tidak dapat ditempuh karena terdapat persyaratan genealogis yang berkaitan dengan kepemilikan *ske*. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya langkah untuk menembus batas yang selama ini menentukan akses masyarakat terhadap kepemimpinan desa melalui struktur adat.

Pandangan kritis terhadap pembatasan pencalonan kepala desa tidak hanya muncul dari individu yang berupaya memasuki kontestasi, tetapi juga terlihat dari pandangan sebagian masyarakat yang mempertanyakan terbatasnya kesempatan untuk mencalonkan diri. Bagi sebagian masyarakat, kepemimpinan desa semestinya tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kedudukan dalam struktur adat, tetapi juga terbuka bagi masyarakat lain yang memiliki kemampuan dan gagasan untuk menjalankan pemerintahan desa. Pandangan tersebut mencerminkan adanya keinginan untuk memperluas kesempatan dalam kontestasi kepemimpinan desa, meskipun belum mampu mengubah pola pencalonan yang masih ditentukan oleh struktur adat.

Keinginan untuk membuka ruang pencalonan yang lebih luas belum menghasilkan perubahan terhadap pola pencalonan yang berlaku. Struktur adat tetap menjadi dasar dalam menentukan siapa yang dapat memasuki kontestasi kepala desa, sementara masyarakat yang berada di luar struktur tersebut belum memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses kepemimpinan desa. Resistensi terhadap pembatasan akses politik masih terbatas dan belum mampu menggeser kedudukan struktur adat sebagai pihak yang menentukan arah kepemimpinan desa.

Kritik terhadap pembatasan tersebut menunjukkan bahwa dominasi adat dalam kepemimpinan desa tidak sepenuhnya diterima tanpa pertanyaan dari masyarakat. Pihak-pihak yang mempertanyakan aturan tersebut belum memiliki posisi yang cukup kuat untuk mengubah pola kepemimpinan yang telah berlangsung. Struktur adat tetap memegang peranan penting dalam menentukan akses terhadap kepemimpinan desa, sementara ketentuan yang menjadikan kedudukan dalam struktur adat sebagai dasar pencalonan kepala desa masih tetap berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, adat memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan kepemimpinan desa di Kedepatian Semerap. Peran tersebut terlihat dari kedudukan Depati dan Nenek Mamak yang dihormati masyarakat serta keterlibatan mereka dalam menentukan calon kepala desa. Kesempatan untuk mengikuti pencalonan juga berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam struktur adat dan persyaratan yang berlaku. Hal ini membuat masyarakat yang berada di luar struktur adat memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk mengikuti pemilihan kepala desa.

Pengaruh adat tersebut dapat terus bertahan karena tidak hanya didukung oleh aturan adat, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap kedudukan tokoh adat. Dalam pandangan Gramsci, penerimaan seperti ini berkaitan dengan *consent* dan *common sense*, ketika suatu aturan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar dalam kehidupan masyarakat. Namun, tidak semua masyarakat menerima keadaan tersebut begitu saja. Adanya warga yang mencoba mencalonkan diri dari luar struktur adat dan pandangan sebagian masyarakat yang menginginkan kesempatan yang lebih terbuka menunjukkan bahwa pembatasan tersebut mulai dipertanyakan. Meskipun belum mengubah aturan pencalonan yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa posisi adat dalam kepemimpinan desa tidak sepenuhnya diterima tanpa adanya kritik dari masyarakat.

E. Referensi

- Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, Ardah, F. K., Nurmahdi, A., Apriyeni, B. A. R., Purwanti, Adrianingsih, Y. N., & Putra, M. F. P. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya*. Tahta Media Group.
- Bakri, W. (2022). *Hegemoni Politik, Kekuasaan dan Media*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Efyanti, Y., Hainadri, Mahabbati, S., & Harlina, D. (2017). Peran Kaum Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Lima Desa Dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 15(2), 42. <https://doi.org/10.32694/010310>
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian kualitatif studi Fenomenologi, Case study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada.
- M.Yusuf, & Effendi, gina N. (2021). Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci. *Tanah Pilih*, 1(1), 11–19.
- Mayrudin, Y. M., Husna, N. A., & Yuliati, F. R. (2020). Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. *Journal of Political Issues*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30>
- Patria, N., & Arief, A. (2025). *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Pustaka Pelajar.
- Samsu. (2017). *Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Syamsuddin, N., Simbolon, G. A. H., Surni, A. Gani, R., Bugis, H., Towe, M. M., Guntur, M., Maulidah, S., Taufik, M., Presty, M. R., & Pitri, A. D. (2023). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Hamjah Diha.